



# JURNAL Pendidikan Sejarah Indonesia

Online ISSN: 2622-1837

## PERJALANAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA SEJAK MASA ORDE BARU SAMPAI AWAL REFORMASI (1994-2004)

Choiriyah Fitriyani, Nurzengky Ibrahim, Umasih

[choiriyahyani31@gmail.com](mailto:choiriyahyani31@gmail.com)

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia.

**Abstract:** *Scientific and technological mastery form one of the essential elements for the development support of an advanced and self-sufficient nation. In the face of the challenges of development, it is hoped that science and technology will improve the quality of human resources so that communities are adequately qualified to adapt to each development. In an effort to improve the quality of human resources, governments have contributed to the efforts of improving the quality of the vocational high school (SMK). Vocational secondary schools play a key role in preparing learners to create graduates who have a professional attitude at work to prepare for a competent workforce. As a dual system of education (PSG) in vocational high schools began a new partnership between schools and the unprecedented business world. Involvement between the two sides is one of the key factors in the success of the dual system education. The school has a responsibility to make the work world a guide in the making of a curriculum or a study in a school. This is to match the compatibility between the compatibility of the workplace skills of the educational society and the types of work the industry/job needs. Thus, institutions of education are required to be able to produce graduates who have the skills to work according to the types of work that the work world or industry needs. While the industry is expected to be able to guide learners in industrial practice activities, planning all the needs needed by learners during carrying out PSG.*

**Keywords:** vocational high school, dual system education, history



ARTICLE INFO:  
Research Article

*Article history:*

Received 28 June 2021

Revised 13 December 2021

Accepted 13 December 2021

Published 16 December 2021

Available online 16 December  
2021

This work is licensed under  
a [CC BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya seseorang dalam mengembangkan potensi diri guna tercapainya taraf hirup yang lebih baik. Secara luas, pendidikan merupakan usaha dalam memperbaiki kemiskinan pengetahuan serta dapat menangani permasalahan didalam negara. Jika mengarah pada

pendidikan nasional, bahwa pendidikan berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai luhur pancasila. Semakin pesatnya perkembangan zaman, pendidikan juga diharapkan mampu mengikuti setiap jalur perkembangan zaman dengan harapan pendidikan mampu mengubah masyarakat menjadi semakin maju dan terdepan.

Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memberikan wajah baru bagi dunia pendidikan. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memberikan dampak dengan mendorong pendidikan untuk terus meningkatkan kualitasnya. Pada masa orde baru pemerintah mengarahkan setiap program Pembanguann Jangka Panjang II (PJP II) lebih difokuskan pembangunannya pada bidang IPTEK dengan memperhatikan setiap pelaksanaan dan pengembangannya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat menjadi bagian dari terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dengan melaksanakan pelatihan, penataan pada setiap kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan saat proses pembelajaran.

Langkah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi bagian dalam mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang berkompeten dan memiliki daya saing guna memasuki dunia kerja. Semakin pesatnya perkembangan zaman dan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, daya saing dalam dunia kerja pun semakin meningkat. Melalui Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 080/U/1993 dijelaskan bahwa arah kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan sebagai wadah bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan keahliannya serta mengarahkan siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan keahlian yang ditekuni. Sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kualitas sumber daya manusia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) merancang program yang ditujukan untuk lembaga kejuruan guna meningkatkan sikap profesionalitas kerja lulusan melalui kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan program yang dirancang dan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro pada tahun 1994 dengan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan kejuruan dengan dunia usaha atau industri (Nurharjadmo, 2008).

Sebelum diterbitkannya kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tahun 1994, kualitas keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan lembaga kejuruan masih belum mampu memenuhi persyaratan ketenagakerjaan, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan para lulusan tentang teknologi. Minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah juga menjadi dampak besar dalam proses pembelajaran sehingga kualitas keterampilan siswa juga menjadi sulit diukur pada saat proses pembelajaran di kelas. Perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang cukup lamban sehingga mengurangi daya tarik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang ingin mendaftarkan di sekolah kejuruan. Pada tanggal 15 dan 16 November 1994 Wardiman Djojonegoro melaksanakan rapat besar dengan para pemimpin Asia Pasifik yang membahas mengenai kerja sama perdagangan bebas dengan APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*). Dalam pertemuannya menghasilkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan deklarasi bogor. Dengan

dibukanya pasar global bagi masyarakat maka akan berdampak pula pada persaingan tenaga kerja. Tidak hanya dengan negara sendiri namun persaingan tersebut juga dihadapkan dengan tenaga kerja asing. Hal ini juga yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam memperbaiki sumber daya manusia.

Pada tahun 1994 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di beberapa sekolah. Pada tahapan awal penerapan kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tercatat siswa SMT Pertanian Jember sebanyak 23 orang siswa kelas tiga yang berasal dari jurusan peternakan melakukan kerja sama dengan PT Charoen Pokphand Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam yang setiap tahun merekrut para lulusan dari SMT Pertanian Jember. Pada tanggal 9 Mei 1994 SMT Pertanian Jember melakukan kerjasama dengan PT Astra Argo Nigaga yang merupakan perusahaan bergerak di bidang argo industri. Selain itu, perusahaan lain seperti PT East west Seed Indonesia, PT Sang Hyang Sri, PT Sebatin dan PT Sweetens Industries turut melakukan kerjasama (Rusdono, 1994)

Demi tercapainya tujuan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sesuai yang diharapkan maka lembaga pendidikan kejuruan bersama dengan pihak industri harus terciptanya komunikasi yang baik dan searah. Pihak lembaga pendidikan kejuruan sangat membutuhkan informasi mengenai ketenagakerjaan yang dimiliki industri sehingga sekolah dapat memahami kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di industri yang dituju. Sedangkan pihak industri membutuhkan informasi mengenai berbagai prosedur dalam program Pendidikan Sistem Ganda. Dengan demikian agar tercapainya tujuan PSG lembaga pendidikan diharapkan mampu menemukan pihak pasangan atau industri yang dapat menjalin kerja sama. Kerja sama kedua pihak tersebut diharapkan dapat saling memberikan manfaat untuk keduanya. Karena pada kenyataannya penyelenggaraan kegiatan pendidikan kejuruan tidak dapat terlepas dari dunia nyata dengan mengikutsertakan pihak lain sebagai pasangannya yaitu dunia industri atau usaha. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan praktik siswa maka diharuskan melaksanakan kegiatan evaluasi praktik. Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari pihak sekolah, industri dan organisasi yang berkaitan dengan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Bentuk penilaian mutu siswa meliputi dua aspek yaitu pencapaian keterampilan siswa dalam mengenal alat industri dan etos kerja yang meliputi kedisiplinan serta ketelitian siswa dalam melaksanakan praktik industri.

Sistem PSG sebenarnya memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan masih berlanjut hingga saat ini. Kajian tentang PSG pada umumnya bersifat generik dan kontemporer, misalnya saja tentang efektifitas pembelajaran PSG (Surachim, 2016), evaluasi implementasi kebijakan PSG (Nurharjadmo, 2008), relevansinya dengan dunia kerja (Wayoong, 2010) dan manajemen mutu PSG (Murniati, 2021). Namun sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji perjalanan historis PSG. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan sistem PSG sejak masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi celah akademis yang ditinggalkan oleh akademisi lain tentang sistem PSG di Indonesia.

## METODE

Pada artikel ini penulis melakukan pengolahan data-data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mengkaji, menganalisis secara kritis serta menuliskan kembali dengan mengedepankan kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan metode penulisan sejarah atau historis. Penelitian historis berupaya dalam merekonstruksi fakta-fakta sejarah melalui pengumpulan data terkait. Menurut (Kuntowijoyo, 2013) penulisan dengan metode penelitian historis menerapkan lima langkah yang terdiri dari pemilihan topik kajian, pengumpulan data-data terkait (heuristik), pemilahan data yang akurat dan kredibel (verifikasi), menafsirkan data-data yang telah berhasil dipilah (interpretasi) dan menuliskan kembali fakta-fakta sejarah yang telah melewati tahapan penulisan sejarah (historiografi).

Pada tahapan pertama penulis memiliki daya tarik emosional dengan kebijakan-kebijakan pendidikan kejuruan di Indonesia dan memfokuskan pada kebijakan pendidikan sistem ganda. Setelah penulis berhasil menentukan topik penelitian, berikutnya penulis mengumpulkan data-data terkait melalui buku, jurnal, koran dan arsip berupa Undang-Undang tentang pendidikan kejuruan. Setiap data dipilah dengan memperhatikan tanggal peristiwa, tahun terbit setiap data, penggunaan huruf, model pengungkapan pada setiap pernyataan dalam tulisan serta keterkaitan antardata yang diperoleh. Data-data yang akurat dilakukan penafsiran kembali oleh penulis untuk dijadikan tulisan pada akhir tahapan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda dan Pembangunan

Pada tahun 1993 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengalami masa peralihan menteri. Diangkatnya Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Pada masa orde baru setiap kebijakan yang diberlakukan akan selalu terarah pada pembangunan. Hal ini dikarenakan tujuan kebijakan orde baru mengarah pada upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam pendidikan ditandai dari hasil produk pendidikan yang diarahkan untuk menjadi pekerja (Darmaningtyas, 2015). Sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan lulusan menjadi tenaga kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya pembangunan nasional.

Sebelum tahun 1993 Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia mengalami peningkatan secara kuantitas yang meliputi jumlah siswa yang masuk maupun lulusannya. Berdasarkan data (Wena, 1996) Jumlah murid baru pada tahun ajaran 1990-1991 Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) di Indonesia menerima murid baru sebanyak 452.000 dengan jumlah perbandingan lulusan sebanyak 398.0000. Pada tahun ajaran berikutnya 1991-1992 SMKTA di Indonesia menerima murid baru sebanyak 476.000 dengan jumlah lulusan sebanyak 396.000 dan pada tahun ajaran 1992-1993 SMKTA di Indonesia menerima murid baru sebanyak 515.000 dengan jumlah lulusan sebanyak 407.0000. Berdasarkan data tersebut sudah seharusnya

pemerintah mengambil langkah dalam mengatasi persoalan sumber daya manusia di lembaga kejuruan yang di arahkan sebagai lulusan yang siap menjadi tenaga kerja.

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah turut berupaya dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang diharapkan dapat membantu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keterampilan para lulusan sekolah kejuruan. Mengingat bahwa masalah pengembangan sumber daya manusia pada masa Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) masih kurang diperhatikan sehingga hal ini menjadi perhatian tegas bagi pemerintah di masa Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II). Berbagai persoalan yang menghambat jalannya pembangunan nasional seperti munculnya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja, adanya ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan persyaratan yang ditetapkan industri sehingga banyaknya kesempatan kerja namun tidak dapat terisi dan semakin pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di masa mendatang. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan bahwa dalam PJP II perlu melahirkan kualitas manusia yang futuristik atau terfokus pada masa depan dengan berpedoman pada Pancasila serta seimbang dengan hubungan antar manusia, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dikeluarkannya kebijakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tahun 1994 oleh Wardiman Djojonegoro memberikan wajah baru bagi dunia pendidikan kejuruan. Lembaga kejuruan yang sebelumnya hanya terfokus pada pelatihan di sekolah, PSG hadir menjadi jawaban dari banyaknya harapan masyarakat mengenai perbaikan sistem pendidikan. Pendidikan sistem ganda juga merupakan bentuk pelaksanaan dari konsep *link and match* yang dicetuskan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Konsep *link and match* tersebut memiliki tujuan sebagai sarana bagi pembangunan pendidikan dan perubahan sosial. Artinya, *link and match* merupakan program pembelajaran yang memiliki keterkaitan dan kesepadanan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Asnan, 2018). Dalam arti lain, kedua konsep tersebut membawa peserta didik untuk diberikan pembinaan di sekolah dan selanjutnya peserta didik diarahkan untuk menambah kompetensi lainnya dalam dunia kerja secara langsung sesuai dengan tata pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Melalui keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 080/U/1993 dijelaskan bahwa arah kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan sebagai sarana bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan keahlian bekerja serta mengarahkan siswa dalam memilih karier yang sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Program pendidikan sistem ganda merupakan kebijakan berupa kegiatan pembelajaran dalam dua tempat yaitu sekolah dan tempat praktik (industri) yang dituju. Pelatihan industri yang diterapkan pada program PSG menjadi elemen penting dalam pelaksanaannya. Demi tercapainya tujuan pelaksanaan pendidikan sistem ganda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) membentuk sebuah lembaga yang menunjang berbagai kegiatan pendidikan sistem ganda di sekolah menengah kejuruan. Lembaga tersebut yaitu "Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional" yang telah diatur dalam keputusan bersama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Kamar Dagang dan Industri

Indonesia Nomor 0217/U/1994. Majelis pendidikan kejuruan memiliki berbagai tanggung jawab diantara lain sebagai sarana konsultasi, kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan program pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Proses pembangunan pendidikan kejuruan antara pihak sekolah dengan institusi pasangan atau industri perlu melakukan beberapa langkah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan sistem ganda. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak terkait dalam pelaksanaan program sistem ganda yaitu diantaranya melakukan usaha persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan. Persiapan atau perencanaan dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Persiapan tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun dilakukan juga oleh seluruh pihak yang terkait dalam program pendidikan sistem ganda. Pada tahap pelaksanaan ini lembaga pendidikan dan industri memiliki tugas yang sama ketika siswa melakukan kerja lapangan yaitu sebagai keduanya berperan sebagai pendamping dan pembimbing siswa. Aturan lain yang mengatur tata pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0279/U/1995 tentang kebijaksanaan departemen pendidikan dan kebudayaan bahwa lembaga pendidikan kejuruan perlu dilakukannya peningkatan sistem ganda dengan meningkatkan mutu serta relevansi keterampilan lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri. Langkah-langkah peningkatan sistem ganda ini dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan industri atau dunia usaha serta mengupayakan secara maksimal unit produksi, bimbingan kejuruan, Majelis Sekolah (MS) serta program Pengembangan Sekolah Seutuhnya (PSS). Upaya persiapan lain yang dilakukan pihak sekolah dalam memulai langkah mewujudkan program sistem ganda yaitu membuat perjanjian kerjasama yang bersifat formal dengan pihak industri. Perjanjian kerjasama dibuat agar kurikulum yang disusun oleh lembaga kejuruan sesuai dengan program kerja pada industri. Perjanjian kerjasama dapat dimulai dengan membuat aturan berupa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai acuan selama pelaksanaan program sistem ganda.

Model atau pola pelaksanaan yang terdapat dalam naskah perjanjian dapat dipilih dan disepakati oleh kedua pihak. Lembaga pendidikan maupun institusi pasangan dapat memilih salah satu dari tiga pola pelaksanaan program pendidikan sistem ganda yang terdiri dari *block relase*, *days relase* dan *hours relase* (Wena, 1996). Model pembelajaran *block relase* merupakan model pembelajaran dengan pembagian waktu yang disepakati bersama antara pihak industri dan sekolah dengan aturan waktu per-bulan atau per-catur wulan atau per-semester. Model *day relase* merupakan model pembelajaran dengan jumlah waktu sebanyak enam hari dalam satu minggu. Pembagian waktu dalam model pembelajaran ini dibentuk kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak industri terkait. Pada model pembelajaran *hours relase* dilakukannya kesepakatan waktu dengan ketentuan pada jam-jam tertentu peserta didik di sekolah dan selanjutnya peserta didik melakukan praktik di tempat industri yang telah ditentukan.

Sebagai langkah dalam terciptanya efektivitas pelaksanaan program Pendidikan Sistem ganda (PSG) pemerintah melakukan kerja sama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang dipimpin oleh Ir. Aburizal Bakrie pada tahun 1994. Langkah tersebut diambil oleh pemerintah agar setiap pelaksanaan dapat terorganisasi dengan baik. Dalam pertemuannya tersebut menghasilkan kesepakatan pada tanggal 19 Agustus 1994 dengan membentuk organisasi "Majelis Pendidikan Kejuruan". Melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 0217/U/1994 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional bahwa dibentuknya Majelis Pendidikan Kejuruan secara umum bertujuan sebagai sarana konsultasi, kerjasama dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan program pendidikan sekolah menengah kejuruan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan praktik industri, tahapan terakhir setelah dilaksanakannya praktik yaitu tahapan penilaian. Jika pengujian telah selesai, siswa akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti.



**Gambar 1. Siswa SMIT Pertanian Jember melakukan praktik pembuatan kerupuk dari telur asin yang rusak**

(sumber: *Republika*, 13 Juni 1994)

### Perjalanan Pendidikan Sistem Ganda

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada tahun 1994 beracuan pada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan pernyataan dalam kurikulum 1994 bahwa pendidikan menengah kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta didik dalam meningkatkan profesionalitas dalam memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan PSG sejak tahun 1994/1995 sampai bulan April 1995 di SMK secara garis besar telah menjalin kerja sama dengan dunia industri atau usaha. Berdasarkan laporan bulan April 1995 secara nasional telah dilaksanakan oleh 247 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia (Haryana, 1995). Selanjutnya pada tahun ajaran berikutnya terjadi penambahan dalam daftar jumlah sekolah yang mengikuti program PSG yaitu sebanyak 263 SMK Negeri sehingga jumlah

sekolah yang ikutserta dalam program PSG berjumlah 500 sekolah dengan mengikutsertakan 11.214 industri dengan jumlah siswa 62.487. Pada tahun ajaran 1996/1997 pelaksanaan program PSG mulai meningkat di seluruh SMK Negeri di Indonesia dengan mengikutsertakan lebih dari 20.000 industri dengan 125.000 siswa yang melaksanakan pelatihan praktik dan sebanyak 300 SMK swasta di Indonesia telah mengikuti program pendidikan sistem ganda.

Kondisi pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda pada tahun 1997 baru 60% sekolah yang melakukan pengiriman guru ke tempat industri yang dituju. Dilaksanakannya pengiriman guru ke tempat kerja praktik agar seluruh guru yang ditugaskan oleh sekolah bertujuan agar guru yang turut serta mendampingi siswa mendapatkan wawasan keindustrian sehingga benar-benar mampu membimbing siswa selama pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Selain itu dalam tahapan perencanaan belum seluruh pihak sekolah yang melibatkan pihak industri dalam penyusunan kurikulum, hal ini berpengaruh pada ketidakpahaman pihak industri dengan sistem pelaksanaan program praktik siswa.

Perubahan kurikulum edisi 1999 yang menggantikan kurikulum 1994 belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PSG pada periode orde baru. Berdasarkan data (BPS, 2020) jumlah pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 1998 berjumlah 851.902 siswa dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 1999 sejumlah 994.254 siswa. Terjadinya peningkatan pada angka pengangguran tersebut salah satunya disebabkan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang masih kurang efektif. Sebagian besar permasalahan tersebut muncul dikarenakan guru pembimbing dan instruktur di industri kurang efektif dalam membimbing siswa. Terjadinya penolakan dari pihak industri saat diminta untuk dilakukannya kerja sama. Kegagalan lain yang cukup menonjol karena tidak adanya standarisasi dalam kompetensi dan sertifikasi sehingga hal ini menyebabkan tidak relevannya keterampilan dan pengetahuan lulusan dengan persyaratan industri dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi tidak diakui oleh sebagian industri.

Pada tahun 2000 implementasi program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) menggunakan pola pelaksanaan praktik *block relase*. Model pembelajaran *block relase* merupakan model pembelajaran dengan pembagian waktu yang disepakati bersama antara pihak industri dan sekolah dengan aturan waktu per-bulan atau per-catur wulan atau per-semester. Pembagian waktu dalam model pembelajaran ini dibentuk kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak industri terkait. Sebagai tahapan dalam langkah persiapan, guru memberikan pengarahan kepada siswa dengan menjelaskan tujuan dan manfaat penyelenggaraan PSG. Kurangnya komunikasi antara pihak industri dan sekolah sehingga materi yang disampaikan di kelas tidak sesuai dengan tuntutan pihak industri saat pelaksanaan praktik. Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik Nasional tingkat pengangguran lulusan SMK dari tahun 2000-2001 mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pada tahun 2000 pengangguran lulusan SMK berjumlah 651.369 orang, sedangkan di tahun 2001 pengangguran SMK berjumlah 1.051.912 orang. Data ini menjadi acuan bagi pemerintah

untuk memperbaiki kembali sistem pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di tahun berikutnya.

Pada tahun 2003 Indonesia melaksanakan revisi undang-undang yang menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Indriaturrahmi & Sudiyatno, 2016). Perubahan ini berisi tentang pegakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pemberian wewenang, hak dan kewajiban untuk mengurus daerah pemerintahannya sendiri. Pengelolaan dan pengembangan tersebut termasuk juga pada bidang pendidikan yang mengalami perubahan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Penyelenggaraan otonomi pendidikan juga sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menengaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional. Setiap daerah diberikan otonomi untuk mengembangkan pendidikan. Pelaksananya banyak sekolah yang mengembangkan kurikulumnya untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam mengimplementasikan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pemerintah mendorong lembaga kejuruan untuk menerapkan model pembelajaran *production based training* atau pelatihan berdasarkan produksi.

### **Hambatan pelaksanaan**

Selama pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ditemukan berbagai hal yang menjadi bagian dari penyebab Pendidikan Sistem Ganda (PSG) masih sulit diterapkan sesuai dengan harapan. Tahapan evaluasi merupakan bentuk dari tahapan yang sangat penting karena pihak sekolah dan institusi pasangan dapat mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan praktik berdasarkan perencanaan program pendidikan sistem ganda yang telah dibuat. Melalui evaluasi kedua pihak dapat mempelajari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan. Jika kelemahan tersebut sudah diketahui maka akan lebih mudah untuk melakukan perbaikan, peningkatan serta pengembangan kualitas program pendidikan.

Program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan model penyelenggara pendidikan yang baru sehingga tidak jarang ditemukannya hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan praktik siswa. Berdasarkan hasil evaluasi ditemukannya permasalahan pada tahun 1995-1996 yaitu pemerintah belum menemukan pola pelaksanaan pendidikan sistem ganda yang tepat sehingga pelaksanaan praktik kerja siswa masih banyak terjadinya hambatan. Selain itu juga adanya keluhan mengenai kurangnya tempat kerja praktik. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan daya tampung peserta untuk melaksanakan pelatihan industri pada satu periode. Selain adanya keterbatasan daya tampung, terbatasnya tempat kerja praktik yang relevan sesuai dengan program studi di lembaga kejuruan. Berdasarkan evaluasi tersebut, masalah keterbatasan ini dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang tepat. Pihak sekolah yang masih belum matang dalam memikirkan kemampuan industri sekitar yang akan dijadikan sebagai tempat pelatihan siswa.

Pada masa Pembangunan Lima Tahun VI (PELITA VI) periode 1993-1998 ditemukannya hambatan pada masa pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) seperti masih ada sekolah yang belum mengacu pada aturan yang telah dibuat sehingga terjadinya perbedaan antara perencanaan dan saat pelaksanaan. Majelis Sekolah yang telah dibuat dengan tujuan membantu jalannya Pendidikan Sistem Ganda (PSG) masih belum berfungsi sesuai dengan yang di harapkan. Selama pelaksanaan pelatihan praktin industri, waktu pelaksanaan pembelajaran di sekolah menjadi berubah, hal ini menyebabkan guru harus mengatur jadwalnya kembali dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan praktik siswa dengan tugas-tugas guru lainnya. Kemampuan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PSG masih perlu dilakukannya peningkatan seperti Majelis Pendidikan Kejuruan yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan program pendidikan sistem ganda. Perencanaan merupakan langkah awal yang wajib diperhatikan agar setiap langkah selama pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hambatan yang menjadi permasalahan saat pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sudah seharusnya sekolah sebelum menentukan pola pembelajaran perlu memahami setiap aturan atau kebiasaan kerja industri agar Pendidikan Sistem Ganda (PSG) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, perlunya memperkenalkan program PSG kepada industri dengan mengundang pihak industri untuk melakukan pertemuan (Wayong, 2010). Hambatan lain selama pelaksanaan PSG adalah penyaluran dana. Sekolah mengeluhkan bahwa penyaluran dana yang diberikan untuk kebutuhan praktik siswa di industri sangat terbatas sehingga tidak jarang sekolah meminta bantuan sumbangan kepada siswa.

## SIMPULAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang beriringan dengan pesatnya zaman. Akibatnya masyarakat akan terbawa arus serta mulai terciptanya kehidupan yang semakin maju. Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memunculkan peningkatan daya saing sehingga masyarakat dapat lebih meningkatkan kualitas sumber dayanya. Berdasarkan proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, nyatanya pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan. Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan usaha pemerintah dalam menuntaskan permasalahan kurangnya kualitas sumber daya lulusan lembaga kejuruan yang berpengaruh pula pada angka pengangguran. PSG merupakan sebuah proses pembelajaran yang melibatkan dua tempat yaitu sekolah dan industri dengan tujuan tercapainya profesionalitas kerja siswa. Kerja sama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Upaya persiapan sebelum melaksanakan program pendidikan sistem ganda merupakan hal yang fundamental. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan program kejuruan yang dapat meningkatkan kemampuan adaptif dan produktifnya. Secara umum, implementasi program Pendidikan Sistem Ganda di Indonesia masih banyak mengalami berbagai kendala. Dalam melaksanakan PSG pihak sekolah merasa menemukan adanya keengganan dari pihak dunia kerja.

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pelaksanaan pelatihan di industri dinilai merepotkan oleh pihak dunia usaha. Keengganan pihak dunia usaha dan industri untuk berperanserta dalam menyiapkan calon tenaga kerja ini mengisyaratkan belum memahami secara mendalam mengenai Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kecenderungan antara sekolah dan institusi pasangannya cenderung masih diwarnai dengan berbagai kesalahpahaman. Kebanyakan institusi pasangan cenderung menganggap pihak sekolah kurang memahami manfaat kerja sama, kurang berniat untuk bekerjasama dan tidak mengetahui cara-cara untuk bekerjasama dengan institusi pasangannya. Kendala lain yang ditemukan yaitu minimnya fasilitas di sekolah sehingga timbul ketidakmampuan sekolah dalam menunjang berbagai kegiatan pembelajaran siswa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asnan, G. (2018). *Biografi Tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*
- BPS. (2020). *Data Pengangguran Terbuka Pendidikan Tinggi*.
- Darmaningtyas. (2015). *Pendidikan yang Memiskinkan*. Intrans Publishing.
- Darmono. (2016). *Pendidikan Kejuruan Masa Depan*. Pusat Kurikulum Dan Perbukuan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Depdikbud. (1996) *Kuriulum Sekolah Menengah Kejuruan: Landasan, Program dan Pengembangan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. (1993). *Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kongres Pemuda/KNPI VII tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Penerapan IPTEK*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dwijosumarto. (2000). *Implementasi Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Ekonomi Atas*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7, 35-42.
- Ermidawati. (2015). *Peran Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam Masyarakat*. Prosiding APTEKINDO, 209-218.
- Haryana, K. (1995). *Pola Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda*. *Cakrawala*, 3, 121-135.
- Indriaturrahmi, I., & Sudiyatno, S. (2016). *Peran Dunia Usaha Dan Dunia Industri Dalam Penyelenggaraan Smk Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Mataram*. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(2), 162.
- Koran Republika, 13 Juni 1994
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Murniati. (2021). *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Kejuruan*. Yogyakarta: Deepublish
- Muzammil, A. (2016). *Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru*. *Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2), 183-198.
- Nurharjadmo, W. (2008). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. *Spirit Publik*, 4(2), 215-228.
- Surachim, Ahim. (2016). *Efektivitas Pembelajaran Pola Pendidikan Sistem Ganda*. Bandung:

Alfabeta.

Turzah, H. (2019). *Link and Match Pendidikan Sekolah Kejuruan*. Rausyan Fikr, 15(2)

Wayong, A. (2010). *Relevansi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Kejuruan dengan Kebutuhan Dunia Kerja*. Prosiding APTEKINDO, 6(1), 379–384.

Wena, M. (1996). *Pendidikan Sistem Ganda*. Tarsito.